

Kolaborasi Komunitas, Pemerintah dan Akademisi Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program *Clean Up* di Kota Serang

Syarkawi¹, Nuruddin Ar-aniri², Egi Najmi Falah³

^{1,2,3} *Administrasi Negara, Universitas Pamulang, Indonesia*

Received : 7 Februari 2026, Revised : 16 Februari 2026, Published : 3 Maret 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Syarkawi

E-mail: dosen03005@unpam.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dan hasil kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan akademisi dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah melalui program *Clean Up* di Kota Serang. Permasalahan pengelolaan sampah yang ditandai oleh meningkatnya volume sampah, keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir, serta rendahnya partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *Participatory Action Research (PAR)*, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan lingkungan, *Focus Group Discussion (FGD)*, aksi *Clean Up*, dan evaluasi partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas lingkungan, akademisi, dan masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta terbangunnya kerja sama yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Program *Clean Up* juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)*. Kesimpulannya, kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan akademisi melalui program *Clean Up* dapat menjadi model implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata kunci - kebijakan publik, pengelolaan sampah, kolaborasi, *clean up*, partisipasi masyarakat

Abstract

This article aims to describe the implementation and outcomes of collaboration among community groups, government, and academics in the application of waste management policy through the *Clean Up* program in Serang City. The growing complexity of waste management problems, characterized by increasing waste volume, limited landfill capacity, and low public participation, requires a policy approach that involves multiple stakeholders. This study employs a *Participatory Action Research (PAR)* method, which positions the community as an active subject in all stages of the program, including planning, implementation, and evaluation. The activities were carried out through environmental education, *Focus Group Discussions (FGDs)*, *Clean Up* actions, and participatory evaluation involving local government, environmental communities, academics, and local residents. The results indicate an increase in public awareness and participation in waste management, as well as improved cooperation among stakeholders. The *Clean Up* program also encourages behavioral change toward the application of the *Reduce, Reuse, and Recycle (3R)* principles. In conclusion, collaboration among community groups, government, and academics through the *Clean Up* program can serve as an effective model for participatory and sustainable waste management policy implementation at the local level.

Keywords - public policy, waste management, collaboration, *clean up*, community participation

How To Cite : Syarkawi, S., Ar-aniri, N., & Falah, E. N. (2026). Kolaborasi Komunitas, Pemerintah dan Akademisi Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Clean Up di Kota Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 391–397. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i8.254>

Copyright ©2026 Syarkawi Syarkawi, Nuruddin Ar-aniri, Egi Najmi Falah

PENDAHULUAN

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi di wilayah barat Pulau Jawa. Pertumbuhan kota yang relatif pesat berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan perkotaan, termasuk pengelolaan sampah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi, volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Serang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang tahun 2024, timbulan sampah harian telah mencapai lebih dari 600 ton per hari, meningkat sekitar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan tekanan serius terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada, terutama karena Kota Serang hanya mengandalkan satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yaitu TPA Cilowong. Tingkat keterisian TPA tersebut telah mencapai lebih dari 95%, sehingga berada pada kondisi mendekati jenuh dan berpotensi menimbulkan krisis lingkungan di masa mendatang.

Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya praktik pemilahan sampah di sumber (Syarkawi et al., 2025). Sampah organik dan anorganik masih bercampur di tingkat rumah tangga, pasar tradisional, perkantoran, dan kawasan komersial. Akibatnya, upaya pengolahan lanjutan seperti daur ulang dan pengomposan sulit dilakukan secara optimal. Sebagian besar sampah langsung diangkut ke TPA tanpa proses pengurangan atau pengolahan awal, yang pada akhirnya mempercepat beban daya tampung TPA.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kondisi ini cukup signifikan. Pencemaran air tanah akibat rembesan lindi, pencemaran udara akibat pembakaran sampah secara terbuka, serta peningkatan emisi gas metana menjadi masalah yang mengancam kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Kota Serang tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai persoalan lingkungan perkotaan yang kompleks.

Selain aspek teknis, dimensi sosial dan kelembagaan turut memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. Data Badan Pusat Statistik dan DLH Banten tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% masyarakat Kota Serang yang memiliki kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah, eco-enzyme, dan gerakan bersih lingkungan, juga masih relatif rendah dan belum merata.

Di sisi kelembagaan, koordinasi antar-pemangku kepentingan masih belum optimal. Pemerintah daerah, komunitas lingkungan, dan perguruan tinggi cenderung menjalankan perannya masing-masing secara terpisah. Ketiadaan kerangka kolaboratif yang terstruktur menyebabkan berbagai inisiatif pengelolaan sampah berjalan secara sporadis dan belum terintegrasi dalam satu strategi kebijakan yang berkelanjutan.

Padahal, teori *collaborative governance* menekankan bahwa persoalan publik yang kompleks, seperti pengelolaan sampah, membutuhkan keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah daerah berperan sebagai penyedia kebijakan dan fasilitator sumber daya, komunitas masyarakat sebagai pelaksana aksi di lapangan, dan akademisi sebagai penyedia pengetahuan, data, serta inovasi berbasis riset (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks Kota Serang, kerangka kolaboratif tersebut sebenarnya telah memiliki landasan regulatif, antara lain melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip *reduce, reuse*, dan

recycle (3R). Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal karena terbatasnya mekanisme partisipatif yang melibatkan komunitas dan akademisi secara langsung dan berkelanjutan. Di tingkat masyarakat sipil, sejumlah komunitas lingkungan seperti Trash Ranger Banten, Satu Banten, dan *Greeners Community* telah aktif menginisiasi kegiatan *Clean Up Day*, edukasi lingkungan, dan kampanye kesadaran publik. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut masih bergantung pada momentum tertentu dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan pengelolaan sampah daerah.

Sementara itu, perguruan tinggi di wilayah Serang telah menghasilkan berbagai riset dan program pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan isu lingkungan dan pengelolaan sampah. Namun, hasil riset tersebut belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan atau penguatan praktik pengelolaan sampah di tingkat lokal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengetahuan akademik dan praktik kebijakan publik.

Program *Clean Up* yang telah dilaksanakan di beberapa titik di Kota Serang menunjukkan potensi besar dalam membangun partisipasi publik. Kegiatan *Clean Up Serang City Movement*, misalnya, mampu melibatkan ribuan relawan dan mengumpulkan puluhan ton sampah dalam satu kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial yang kuat untuk terlibat aktif, apabila difasilitasi melalui model kolaborasi yang tepat.

Namun demikian, tanpa adanya model kolaborasi formal dan berkelanjutan, kegiatan *Clean Up* berisiko berhenti pada aksi simbolik dan belum mampu mendorong perubahan perilaku jangka panjang maupun penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model kolaborasi multipihak yang mengintegrasikan peran komunitas, pemerintah, dan akademisi dalam satu kerangka kerja yang berkesinambungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk mengembangkan model kolaborasi multipihak berbasis *Clean Up Serang City Movement*. Model ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat sinergi kelembagaan, serta mendorong implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, model ini diharapkan dapat menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* sebagai metode utama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan aksi, hingga evaluasi. PAR dianggap relevan untuk menjawab permasalahan pengelolaan sampah yang bersifat kompleks dan kontekstual, serta membutuhkan keterlibatan langsung berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya di Kota Serang yang memiliki tingkat permasalahan sampah cukup tinggi. Subjek kegiatan meliputi masyarakat setempat, komunitas lingkungan, aparat pemerintah daerah, serta akademisi dari perguruan tinggi yang terlibat dalam program *Clean Up Serang City Movement*.

Tahapan pertama adalah identifikasi dan pemetaan masalah, yang dilakukan melalui observasi lapangan dan diskusi awal dengan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting pengelolaan sampah, pola perilaku masyarakat, serta potensi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Tahap kedua adalah perencanaan partisipatif, yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Pada tahap ini, seluruh aktor yang terlibat bersama-sama merumuskan tujuan kegiatan, bentuk intervensi yang akan dilakukan, pembagian peran, serta indikator keberhasilan program *Clean Up*. Perencanaan partisipatif ini dimaksudkan untuk membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program. Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan, yang meliputi penyuluhan dan edukasi lingkungan, aksi *Clean Up* di ruang publik, serta pendampingan praktik pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Kegiatan ini

melibatkan relawan dari berbagai unsur, termasuk masyarakat, mahasiswa, komunitas lingkungan, dan aparatur pemerintah daerah. Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi partisipatif, yang dilakukan untuk menilai proses dan hasil kegiatan. Evaluasi dilaksanakan melalui diskusi reflektif, pengamatan perubahan perilaku masyarakat, serta dokumentasi hasil kegiatan, seperti jumlah peserta, volume sampah yang terkumpul, dan tingkat partisipasi pemangku kepentingan. Tahap akhir adalah refleksi dan penyusunan rekomendasi, yang bertujuan untuk merumuskan pembelajaran dari pelaksanaan program serta menyusun rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Hasil dari tahap ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model kolaborasi multipihak yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program *Clean Up Serang City Movement* menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu menciptakan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengelolaan sampah perkotaan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat lokal, komunitas lingkungan, aparatur pemerintah daerah, hingga akademisi, yang berperan sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan partisipatif.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebelum program dilaksanakan, sebagian besar lokasi kegiatan berada dalam kondisi lingkungan yang kurang terawat, ditandai oleh penumpukan sampah di ruang publik, saluran air, dan bantaran sungai. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta keterbatasan sistem pengawasan dan pengelolaan sampah di tingkat lokal.



Gambar 1.
Clean UP di Kelurahan Banjar Sari

Setelah pelaksanaan kegiatan *Clean Up*, terjadi perbaikan kondisi fisik lingkungan secara signifikan. Area yang sebelumnya dipenuhi sampah berhasil dibersihkan, dan ruang publik kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain dampak visual, kegiatan ini juga menghasilkan pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, meskipun masih dalam skala terbatas.

Dari sisi partisipasi, kegiatan ini berhasil melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Keterlibatan pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta aparatur pemerintah daerah menunjukkan bahwa isu pengelolaan sampah memiliki daya tarik kolektif apabila dikemas dalam bentuk aksi nyata. Hal ini mengindikasikan adanya potensi modal sosial yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan ini. Melalui penyuluhan dan edukasi lingkungan yang dilakukan sebelum dan selama kegiatan *Clean Up*, masyarakat mulai memahami pentingnya pemilahan sampah dan

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah yang tidak tepat. Perubahan pemahaman ini merupakan prasyarat awal bagi perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat belum sepenuhnya konsisten. Sebagian peserta masih memandang kegiatan *Clean Up* sebagai aktivitas insidental, bukan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan perilaku lingkungan membutuhkan proses jangka panjang dan pendampingan yang berkelanjutan.

Dari perspektif kelembagaan, program ini berhasil memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan administratif dan logistik, komunitas lingkungan berperan sebagai penggerak lapangan, sementara akademisi memberikan kontribusi dalam bentuk pendampingan, dokumentasi, dan analisis kegiatan. Kolaborasi ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama. Selama pelaksanaan kegiatan, interaksi langsung antar aktor membuka ruang dialog yang konstruktif, sehingga masing-masing pihak dapat memahami peran dan keterbatasan satu sama lain.

Meskipun demikian, kolaborasi yang terbangun masih bersifat informal dan berbasis kegiatan. Belum terdapat mekanisme kelembagaan yang secara formal mengatur peran, tanggung jawab, dan keberlanjutan kolaborasi antar aktor. Hal ini menjadi tantangan utama dalam memastikan keberlangsungan program di masa mendatang. Dari sisi kebijakan, kegiatan *Clean Up* memberikan kontribusi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip 3R. Program ini berfungsi sebagai instrumen implementatif yang menjembatani kebijakan normatif dengan praktik lapangan.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis aksi kolektif lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan yang bersifat regulatif semata. Masyarakat cenderung lebih responsif terhadap kegiatan yang memberikan dampak langsung dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks peran akademisi, kegiatan ini menjadi media transfer pengetahuan antara dunia akademik dan masyarakat. Akademisi tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran dan penyedia rekomendasi berbasis data. Namun, optimalisasi peran ini masih memerlukan sistem yang lebih terstruktur agar hasil riset dapat terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan daerah.

Dari aspek keberlanjutan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa *Clean Up* memiliki potensi besar sebagai pintu masuk perubahan sosial. Akan tetapi, tanpa dukungan program lanjutan seperti pembentukan bank sampah, sistem insentif, dan penguatan kelembagaan lokal, dampak kegiatan berisiko bersifat sementara. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dilepaskan dari aspek tata kelola. Persoalan sampah merupakan masalah publik yang bersifat multidimensional dan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi tidak boleh berhenti pada level kegiatan, tetapi harus diinstitutionalisasi dalam kebijakan dan struktur organisasi.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kegiatan *Clean Up* berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek kota berkelanjutan dan konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari *top-down* menuju *bottom-up governance*. Hasil tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan fasilitatif dari pemerintah daerah. Tanpa peran aktif pemerintah sebagai enabler, kolaborasi lintas aktor berpotensi kehilangan arah dan keberlanjutan. Selain itu, pentingnya kepercayaan antar pemangku kepentingan menjadi temuan kunci dalam kegiatan ini. Kepercayaan yang terbangun melalui interaksi langsung dan transparansi proses menjadi modal utama dalam menjaga komitmen bersama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa model kolaborasi berbasis *Clean Up* memiliki relevansi dan potensi untuk dikembangkan sebagai strategi pengelolaan sampah perkotaan. Namun, model ini masih

membutuhkan penyempurnaan, khususnya dalam aspek kelembagaan, pendanaan, dan integrasi kebijakan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif bukanlah solusi instan, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, adaptasi, dan pembelajaran bersama. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan refleksi bersama menjadi elemen penting dalam pengembangan model kolaborasi yang efektif. Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Serang sangat ditentukan oleh kemampuan membangun dan menjaga kolaborasi multipihak yang berkelanjutan. Program Clean Up dapat menjadi katalis perubahan, asalkan didukung oleh kerangka tata kelola yang kuat, partisipatif, dan berbasis bukti.

KESIMPULAN

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Serang merupakan isu publik yang bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan teknis dan regulatif semata. Tingginya timbulan sampah, keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir, serta rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan pendekatan tata kelola yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Berdasarkan hasil pelaksanaan program *Clean Up Serang City Movement*, kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan akademisi terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas partisipasi publik, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan *collaborative governance* memberikan kerangka yang relevan dalam menjelaskan efektivitas kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sampah. Program *Clean Up* berfungsi sebagai instrumen implementatif kebijakan yang menjembatani kebijakan normatif dengan praktik lapangan, sekaligus menjadi ruang pembelajaran bersama bagi seluruh aktor yang terlibat. Meskipun demikian, kolaborasi yang terbangun masih bersifat kegiatan dan belum sepenuhnya terlembagakan, sehingga keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen aktor dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan kolaborasi melalui pembentukan mekanisme formal yang mengintegrasikan peran komunitas, pemerintah, dan akademisi secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sampah perlu didukung oleh strategi edukasi berkelanjutan, sistem insentif, serta pemanfaatan data dan hasil riset akademik sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ke depan, pengembangan model kolaborasi berbasis Clean Up diharapkan tidak hanya berkontribusi pada perbaikan kondisi lingkungan Kota Serang, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktik baik bagi pengelolaan sampah perkotaan di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, A., Saripudin, S., Hidayat, M. H., Panjaitan, R., Nuryati, N., Dewi, M., & Syarkawi, S. (2025). Sosialisasi jerat pergaulan bebas di SMK Negeri 1 Tanara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 1(6), 205-212.
- Agarwal, B. (1997). *Environmental action, gender equity and women's participation*. *Development and Change*, 28(1), 1-44. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00033>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. (2024). *Laporan tahunan pengelolaan sampah Kota Serang tahun 2024*. Pemerintah Kota Serang.
- Fatmawati, L., Jaenul, J., Wulandari, N., & Masripa, M. (2025). Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Serang. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 4(3).

- Juwandi, D., Nurhayati, R., & Fathoni, A. (2023). *Analisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia: Studi kasus Kota Serang*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 155–170. <https://doi.org/10.24843/japi.v9i2>
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kota Serang.
- Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, S., Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., ... & Windra, P. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Syarkawi, S., & Maulana, M. A. (2025). Isu Gender Dalam Manajemen Bencana Dan Lingkungan Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 7(1), 141-147.
- Syarkawi, S., Jaenul, J., Wulandari, N., Fatmawati, L., & Masripa, M. (2025). Sosialisasi Pentingnya Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Gender di Kota Serang. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 4(3), 18–28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.